

THE PROGRESS OF SOVIET MILITARY & DEFENCE EQUIPMENTS IN TNI MILITARY OPERATIONS 1960-1975

Penggunaan Sistem Persenjataan Uni Soviet dalam Operasi Militer TNI 1960-1975

Bagus Raditya Brahma Widodo ^{1a(*)} Mukhamad Shokheh ^{2b}

¹²Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang

adit16082003@gmail.com

adit16082003@students.unnes.ac.id

shokheh@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

adit16082003@gmail.com

How to Cite: Bagus Raditya Brahma Widodo. (2025). Penggunaan Sistem Persenjataan Uni Soviet dalam Operasi Militer TNI 1960-1975 doi: 10.36526/js.v3i2.5568

Received : 18-06-2025

Revised : 12-07-2025

Accepted: 21-07-2025

Keywords:

Cold War,
 History,
 Eastern Bloc,
 Military

Abstract

This research explores the acquisition and strategic function of Soviet military equipment in the Indonesian Armed Forces (TNI) during the period 1960–1975. This study employs historical methods, including heuristics, source criticism interpretation, and historiography. The study draws upon primary sources such as official military documents, memoirs of key military figures, and archival reports, as well as relevant secondary literature. The findings reveal how Indonesia, in response to Cold War geopolitical dynamics and the deterioration of relations with the West, turned to the Soviet Union for large-scale military modernization. Soviet-supplied weaponry such as MiG fighter jets, Whiskey-class submarines, and SA-2 missiles significantly enhanced Indonesia's military capacity, especially in the context of Operation Trikora and Operation Dwikora. However, the political shift post-1965 under the New Order regime led to severed ties with the Eastern Bloc, resulting in severe logistical setbacks and eventual decommissioning of Soviet weaponry. Despite this, Indonesia successfully adapted its defense strategy and conducted Operation Seroja in 1975 using restructured forces and new alliances. This study contributes to understanding the long-term impact of foreign military dependence and the evolution of Indonesia's defense posture during a volatile geopolitical era.

PENDAHULUAN

Organisasi militer merupakan tulang punggung pertahanan suatu negara yang tidak hanya berfungsi sebagai benteng keamanan, tetapi juga sebagai penjamin kedaulatan dan stabilitas nasional. Kehadiran militer yang efektif mampu memberikan rasa aman kepada warga negara, mencegah ancaman eksternal, serta menjaga ketertiban internal. Peran strategis militer semakin kompleks ketika dihadapkan pada dinamika geopolitik global yang terus berubah. Keberhasilan organisasi militer sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kecanggihan sistem persenjataan yang dimilikinya (Ayuningtyas, 2016).

Pada awal 1960, Perang Dingin mencapai puncak intensitas, ditandai oleh rivalitas ideologis dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Polarisasi global ini mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengambil posisi strategis dalam upaya memperkuat pertahanan nasional mereka (Pradicta, 2016). Meskipun secara resmi menganut politik luar negeri Bebas Aktif, Indonesia tidak sepenuhnya lepas dari tarik-menarik kepentingan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur dibawah pimpinan Uni Soviet. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, dengan konsep Demokrasi Terpimpin, posisi geopolitik

Indonesia yang strategis di Asia Tenggara menjadi pusat perhatian dua kekuatan besar dunia (Van der Kroef, 1960).

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat memburuk setelah terungkapnya keterlibatan CIA dalam pemberontakan PRRI/Permesta pada 1958, yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari alternatif dukungan militer. Upaya diplomatik ke Washington gagal karena kekhawatiran Amerika bahwa persenjataan tersebut akan digunakan dalam konfrontasi dengan Belanda. Akibatnya, Jenderal A.H. Nasution mengalihkan orientasi kerja sama militer ke Uni Soviet, meskipun dirinya dikenal memiliki pandangan anti-komunis (Prasetyo, 2021).

Kesepakatan militer Indonesia-Uni Soviet pada Januari 1961 menghasilkan program modernisasi pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia, mencakup berbagai jenis persenjataan seperti pesawat tempur MiG, helikopter Mil, kapal selam kelas Whiskey, dan berbagai peralatan militer lainnya. Namun, ketergantungan terhadap satu sumber tunggal menciptakan kerentanan baru, terutama terkait ketersediaan suku cadang dan dukungan teknis (Purbaningsih, 2005).

Situasi politik dalam negeri turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan sistem persenjataan tersebut. Meskipun Operasi Trikora berhasil mengonsolidasikan klaim Indonesia atas Irian Barat, Operasi Dwikora menghadapi hambatan internal dan ketegangan di dalam tubuh militer. Ketidakeimbangan antara ambisi politik Soekarno dan realitas operasional TNI menciptakan ketegangan strategis (Maulana, 2024).

Peristiwa G30S 1965 menjadi titik balik dalam orientasi kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Pergeseran dari pro-Soviet ke pro-Barat di bawah pemerintahan Orde Baru menyebabkan terhentinya pasokan suku cadang Soviet, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam operasionalisasi sistem persenjataan Uni Soviet. Masa dominasi singkat sistem persenjataan Soviet berakhir, dan dari periode ini, dapat dipetik pelajaran penting mengenai risiko ketergantungan pada satu kekuatan asing.

Periode 1960–1975 merupakan fase transisi krusial dalam pengembangan sistem pertahanan Indonesia. Dalam tekanan geopolitik global dan dinamika politik domestik, Indonesia melakukan transformasi besar dalam orientasi militer dan pengadaan sistem persenjataan. Kajian sebelumnya seperti Prasetyo (2021), Maulana (2024), dan Koessetianto & Prasetyo (2024) lebih banyak membahas aspek diplomasi dan strategi, namun belum secara spesifik menelaah fungsi operasional sistem persenjataan Soviet dalam konteks operasi militer strategis TNI.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi sistem persenjataan Uni Soviet terhadap strategi militer Indonesia, dari proses pengadaan melalui "Misi Nasution" hingga penggunaannya dalam Operasi Trikora, Dwikora, dan Seroja. Fokus utama adalah bagaimana dinamika politik domestik dan internasional memengaruhi penggunaan sistem persenjataan sebagai instrumen pertahanan dan diplomasi.

Secara teoritis, kajian ini memadukan teori modernisasi militer dan teori ketergantungan. Teori modernisasi menjelaskan bagaimana teknologi militer asing diintegrasikan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan, sementara teori ketergantungan memberikan kerangka kritis untuk menilai risiko strategis akibat ketergantungan terhadap satu blok kekuatan.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mengidentifikasi latar belakang politik, ekonomi, dan diplomasi di balik pengadaan sistem persenjataan Soviet oleh Indonesia; (2) menganalisis penggunaan sistem persenjataan Soviet dalam operasi-operasi strategis TNI antara 1960–1975; dan (3) mengevaluasi dampak perubahan politik domestik terhadap kelangsungan penggunaan sistem persenjataan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap fungsi strategis sistem persenjataan Soviet dalam konteks operasi militer Indonesia. Selain itu, kajian ini menghubungkan modernisasi militer dengan dinamika politik domestik serta menyajikan analisis temporal yang luas, dari awal pengadaan hingga transisi menuju orientasi Blok Barat. Dengan pendekatan teoritis ganda, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kebijakan pertahanan Indonesia pada masa Perang Dingin dan relevansinya bagi strategi pertahanan saat ini.

METODE

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah yang melibatkan serangkaian tahapan sistematis dan saling terkait, sehingga memastikan validitas hasil penelitian. Metode sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah melalui pendekatan ilmiah yang objektif dan terstruktur (Gottschalk, 1986:34). Penulis melakukan studi pustaka dan penelusuran arsip sebagai langkah awal dalam tahap heuristik, yaitu proses mengumpulkan berbagai sumber primer berupa dokumen resmi TNI, memoir perwira tinggi seperti karya Jenderal A.H. Nasution, dan laporan-laporan militer periode 1960-1975, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang membahas sejarah militer Indonesia dan hubungan Indonesia-Soviet. Setelah data terkumpul, penulis melakukan kritik sumber untuk menilai keaslian dan keandalan informasi melalui verifikasi autentisitas dokumen dan evaluasi kredibilitas penulis, baik dari segi eksternal maupun internal. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis data dengan menghubungkannya pada konteks geopolitik Perang Dingin dan dinamika politik dalam negeri Indonesia guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai fungsi sistem persenjataan Soviet milik TNI. Akhirnya, semua hasil analisis disusun dalam tahap historiografi, yakni penulisan narasi sejarah yang sistematis, kronologis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang sistem persenjataan Uni Soviet dalam tubuh TNI periode 1960-1975.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Sistem Persenjataan (1960-1961)

Awal tahun 1960 menandai puncak intensitas Perang Dingin antara dua kekuatan adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut berlomba memperluas pengaruh melalui negara-negara satelit atau "proksi" di berbagai belahan dunia. Persaingan ideologi kapitalis versus komunis menciptakan polarisasi global yang memaksa negara-negara berkembang untuk memilih blok kekuatan. Situasi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara yang baru merdeka untuk memperoleh bantuan militer dalam rangka memperkuat pertahanan nasional (Pradicta, 2016).

Pada periode yang sama, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat mengalami kemerosotan signifikan menyusul terungkapnya keterlibatan CIA dalam pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1958. Kejadian ini mendorong pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang semakin condong ke arah anti-imperialis dan berupaya menyeimbangkan pengaruh asing, untuk mencari alternatif sumber dukungan militer. Meskipun ada petinggi Angkatan Darat yang masih berharap dapat memperoleh persenjataan dari Amerika Serikat, upaya diplomatik ke Washington menemui jalan buntu karena kekhawatiran Amerika bahwa senjata tersebut akan digunakan dalam konfrontasi dengan Belanda terkait Irian Barat. Akibatnya, Jenderal A.H. Nasution, meskipun dikenal memiliki pandangan anti-komunis, mengalihkan orientasi kerja sama militer Indonesia ke Uni Soviet (Prasetyo, 2021).

Kerjasama militer dengan Uni Soviet secara resmi mulai ditingkatkan pada tahun 1960 melalui kunjungan Nikita Khrushchev ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, Khrushchev menawarkan bantuan militer sebesar 200 juta dolar AS kepada Indonesia. Bantuan ini ditujukan untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus menunjukkan solidaritas ideologis antara negara berkembang dan kekuatan sosialis. Penawaran ini disambut positif oleh Presiden Soekarno dan para pemimpin militer Indonesia, termasuk Jenderal A.H. Nasution. Langkah ini menjadi dasar bagi dimulainya kontrak besar pengadaan sistem persenjataan dari Uni Soviet.

Pemerintah Indonesia kemudian mengutus sebuah misi militer yang dipimpin langsung oleh Jenderal A.H. Nasution ke Moskow pada akhir tahun 1960. Misi ini dikenal dengan nama "Misi Nasution" dan menjadi tonggak penting dalam sejarah militer Indonesia modern. Tujuan utamanya

adalah untuk merundingkan dan menandatangani kontrak pengadaan sistem persenjataan secara besar-besaran. Hasilnya, pada 3 Januari 1961, Indonesia dan Uni Soviet menandatangani kontrak pengadaan senilai 500 juta dolar AS. Ini menjadi kontrak pengadaan militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia pada masa itu.

Salah satu keunggulan utama dari kontrak dengan Uni Soviet adalah skema pembayarannya yang ringan dan fleksibel. Pembayaran dilakukan secara kredit dengan tenor selama 10 tahun dan bunga rendah sebesar 2,5 persen. Skema ini memungkinkan Indonesia memperoleh persenjataan dalam jumlah besar tanpa segera membebani anggaran negara. Lebih dari itu, Uni Soviet juga menyediakan bantuan teknis, pelatihan personel, dan pembangunan fasilitas militer seperti pangkalan udara dan pangkalan laut. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama ini bukan hanya transaksi jual beli, tetapi bentuk aliansi strategis.

Namun, dalam implementasinya, pengadaan sistem persenjataan ini menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional. Sejumlah peralatan membutuhkan pelatihan teknis khusus dan belum tersedia sistem pendukung yang memadai di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah mengirim teknisi dan prajurit Indonesia ke Uni Soviet untuk pelatihan, terutama dalam pengoperasian jet tempur dan sistem persenjataan berat. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti hanggar, pelabuhan militer, dan pusat perawatan menjadi prioritas. Hal ini menandai transformasi signifikan dalam postur militer Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan persenjataan tambahan mulai muncul, terutama untuk memperkuat matra darat, laut, dan udara secara seimbang. Pada pertengahan tahun 1961, Jenderal Nasution kembali melakukan kunjungan ke Uni Soviet untuk membahas kontrak kedua. Kontrak ini difokuskan pada penguatan pertahanan udara nasional, pelatihan teknisi lanjutan, dan penambahan sistem persenjataan ofensif. Kontrak lanjutan ini menegaskan bahwa Indonesia ingin membangun kekuatan militer yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar pengadaan darurat untuk konflik sesaat. Dukungan Uni Soviet pun terus berlanjut hingga tahun 1963-1964.

Misi pengadaan persenjataan dari Uni Soviet juga mendapatkan dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan TNI Angkatan Laut (TNI AL), yang memang memiliki kebutuhan mendesak akan peralatan canggih. Banyak dari teknologi yang diterima Indonesia masih asing bagi militer saat itu, sehingga perlu adaptasi besar-besaran. Meski demikian, dalam kurun waktu singkat, TNI mampu mengoperasikan sistem-sistem baru tersebut dengan efisien. Modernisasi sistem persenjataan ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri Indonesia di kancah regional.

Kontrak pengadaan sistem persenjataan dari Uni Soviet ini secara drastis meningkatkan kapabilitas militer Indonesia pada awal 1960-1961. Dalam matra udara, TNI AU memperoleh 30 MiG-15, 49 MiG-17, 10 MiG-19, dan 20 MiG-21, serta 22 Il-28 dan 14 Tu-16, termasuk 12 varian maritim Tu-16 yang dilengkapi rudal anti-kapal AS-1 *Kenel*. Untuk transportasi udara, Indonesia mengoperasikan 26 pesawat ringan IL-14 dan Avia-14, serta enam pesawat angkut berat An-12. Di laut, TNI AL diperkuat dengan 12 kapal selam kelas Whiskey, 12 kapal rudal cepat kelas Komar, dan satu kapal penjelajah kelas Sverdlov, yang dioperasikan sebagai KRI Irian. Di darat, kekuatan tempur diperkuat oleh kendaraan tempur lapis baja BTR-50 dan tank amfibi ringan PT-76. Selain itu, Indonesia juga mengoperasikan 41 helikopter Mi-4 dan sembilan Mi-6, serta sistem pertahanan udara SA-2 *Guideline*. Kombinasi dari berbagai sistem persenjataan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer paling modern dan disegani di Asia Tenggara pada masa itu (Easter, 2015).

Sistem Persenjataan Dalam Operasi Trikora Dan Dwikora (1962-1965)

Operasi Trikora dan Dwikora menandai puncak penggunaan kekuatan militer Indonesia pada awal 1960. Kedua operasi ini merupakan respons strategis terhadap dua tantangan besar: penjajahan Belanda di Irian Barat dan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Presiden Soekarno menjadikan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam memperjuangkan kedaulatan nasional. Sistem persenjataan yang baru dibeli, terutama

dari Uni Soviet, merupakan alat-alat yang penting bagi operasi-operasi ini. Dengan kombinasi strategi politik dan kekuatan persenjataan, Indonesia tampil sebagai kekuatan militer dominan di Asia Tenggara. Modernisasi sistem persenjataan terbukti sangat menentukan keberhasilan operasi-operasi tersebut (Oktorino, 2018).

Kebuntuan upaya diplomatik Indonesia terkait pembahasan mengenai pengembalian Irian Barat mendorong terjadinya Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Operasi ini dibagi dalam tiga tahap utama: infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi wilayah Irian Barat. Tahap pertama yaitu infiltrasi, difokuskan pada penyusupan pasukan secara rahasia ke wilayah yang masih dikuasai Belanda. Tahap infiltrasi bertujuan untuk melemahkan posisi militer dan psikologis Belanda di Irian Barat dengan cara menyusupkan pasukan-pasukan khusus ke wilayah tersebut secara tersembunyi. Pasukan-pasukan ini terdiri dari personel elite seperti RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat, sekarang Kopassus), KKO AL (Marinir), dan sejumlah prajurit terlatih lainnya yang dikirim melalui udara, laut, dan darat dalam jumlah kecil. Penyusupan dilakukan di berbagai titik strategis, seperti Merauke, Fakfak, dan Kaimana, untuk membangun jaringan intelijen, melakukan sabotase, dan menggalang dukungan dari penduduk lokal. (Mangkusubroto, 2023).

Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto menjadi pusat kendali dari seluruh operasi Trikora. Koordinasi lintas matra antara TNI AD (Darat), AL (Laut), dan AU (Udara) dijalankan dengan disiplin tinggi. Komando ini bertanggung jawab mengatur strategi penyusupan, penguasaan wilayah, dan konsolidasi hasil-hasil operasi. Dalam pelaksanaannya, keberadaan sistem persenjataan yang modern menjadi salah satu faktor yang mempercepat keberhasilan operasi militer. Selain fungsi tempur, berbagai sistem persenjataan juga digunakan untuk dukungan logistik, evakuasi, dan pengintaian strategis. Strategi perang yang terpadu antara darat, laut, dan udara niscaya akan memberikan hasil yang signifikan di medan operasi (Yazid, 2016).

Penggunaan sistem persenjataan pada tahap infiltrasi Operasi Trikora relatif terbatas, terutama pada elemen laut dan udara. Di matra udara, TNI AU menggunakan pesawat angkut seperti Il-14, C-47 Dakota, dan C-130 Hercules untuk melaksanakan misi transportasi pasukan lintas udara dari satuan RPKAD (kini Kopassus) dan PGT (kini Kopasgat). Pasukan tersebut diterjunkan di sejumlah titik strategis yang berada di sekitar permukiman penduduk dan wilayah perkotaan di Irian Barat sebagai bagian dari operasi infiltrasi terorganisir.

Untuk mendukung misi tersebut, pesawat tempur MiG-17 dan P-51 Mustang digunakan sebagai unsur pengawal guna memastikan perlindungan terhadap jalur penerjunan. Di sisi lain, pesawat Il-28 difungsikan untuk melaksanakan serangan udara terhadap sasaran-sasaran strategis di wilayah Irian Barat, namun rencana ini tidak pernah terealisasi karena konflik berakhir sebelum misi tersebut dapat dijalankan.

Sementara itu, pesawat jarak jauh Tu-16, khususnya varian Tu-16KS yang dilengkapi rudal anti-kapal AS-1 *Kenel*, dikerahkan ke Pangkalan Udara Morotai sebagai bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi eskalasi maritim. Penempatan ini dimaksudkan sebagai upaya penangkal terhadap kehadiran kapal induk Belanda HNLMS Karel Doorman yang saat itu berada di sekitar perairan Irian Barat. Meski demikian, karena penyelesaian konflik dicapai melalui jalur diplomatik, sistem persenjataan ini tidak pernah dioperasikan secara aktif dalam pertempuran.

Di matra laut, berbagai jenis kapal cepat serta kapal selam kelas Whiskey digunakan dalam mendukung operasi infiltrasi melalui jalur pesisir, termasuk untuk mengangkut pasukan dan logistik ke titik-titik strategis. Selain itu, kendaraan pengangkut personel BTR-50 dan tank amfibi PT-76 juga telah dipersiapkan penggunaannya oleh unsur KKO AL (kini Korps Marinir TNI AL) sebagai bagian dari skenario pendaratan amfibi yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahap konsolidasi wilayah. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konflik berakhir lebih awal melalui jalur diplomatik, sehingga rencana penggunaan sistem persenjataan tersebut dalam operasi skala penuh tidak sempat direalisasikan.

Operasi Trikora tidak pernah sepenuhnya direalisasikan karena konflik mereda melalui jalur diplomatik, khususnya melalui mediasi politik internasional yang menghasilkan kesepakatan damai. Meskipun demikian, pelaksanaan fase awal operasi, yaitu tahap infiltrasi, tetap berlangsung dan menghasilkan hasil yang beragam. Di satu sisi, infiltrasi berhasil menunjukkan kemampuan mobilisasi militer dan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi. Namun di sisi lain, tantangan geografis, keterbatasan logistik, dan perlawanan lokal menyebabkan efektivitas operasionalnya tidak sepenuhnya optimal.

Tekanan dari Amerika Serikat terhadap Belanda, yang khawatir akan semakin besarnya pengaruh Soviet terhadap Indonesia sekaligus dalam geopolitik Asia Tenggara serta militerisasi Indonesia yang cepat dan mengkhawatirkan turut mendorong perubahan sikap Belanda terhadap penyelesaian konflik Irian Barat. Operasi Trikora, meskipun belum sepenuhnya dijalankan hingga tahap akhir, berhasil menciptakan tekanan politik dan psikologis di tingkat internasional. Belanda mulai menyadari bahwa mempertahankan Irian Barat melalui kekuatan militer justru berisiko menimbulkan eskalasi konflik yang lebih besar. Kondisi ini mendorong Belanda untuk membuka jalur diplomasi, yang pada akhirnya menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962. Melalui perjanjian tersebut, disepakati bahwa Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia melalui mekanisme administrasi transisi di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah berakhirnya sengketa Irian Barat, Indonesia meraih kemenangan diplomatik yang signifikan. Keberhasilan ini turut membentuk persepsi Indonesia sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan. Keberhasilan diplomatik dalam sengketa Irian Barat kemudian membentuk landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia selanjutnya, khususnya dalam merespons pembentukan Federasi Malaysia, yang dipandang sebagai ancaman terhadap pengaruh regional Indonesia dan stabilitas kawasan. Presiden Soekarno memandang proyek pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk baru neokolonialisme yang dilakukan oleh Inggris di Asia Tenggara. Rencana tersebut dianggap mengancam kedaulatan dan stabilitas kawasan, serta merugikan posisi strategis Indonesia. Sebagai respons, pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye politik dan militer yang dikenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" pada awal tahun 1963, yang kemudian berkembang menjadi kebijakan Konfrontasi Indonesia–Malaysia, baik melalui tekanan diplomatik maupun operasi militer terbatas di wilayah perbatasan.

Selama periode Januari hingga Desember 1963, konflik bersenjata terbatas dalam Konfrontasi Indonesia–Malaysia berfokus di wilayah Kalimantan (Borneo). Indonesia menerapkan pola operasi yang serupa dengan konsep Trikora, yaitu berbasis pada infiltrasi pasukan ke wilayah sasaran. Strategi ini bertujuan untuk menyusupkan satuan-satuan kecil ke Sarawak dan Sabah guna membangun jaringan simpati di kalangan penduduk lokal dan menciptakan ketidakstabilan internal di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, operasi ini mengandalkan dukungan dari kelompok-kelompok lokal seperti Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) dan Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak (PGRS) sebagai elemen pendukung gerakan bawah tanah. Selain itu, operasi ini juga memperoleh sokongan dari berbagai elemen sukarelawan yang telah mendapatkan pelatihan militer oleh TNI serta dari organisasi-organisasi yang berpaham sosialisme atau komunisme, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), yang secara ideologis mendukung kebijakan anti-imperialisme Indonesia.

Hasil yang dicapai selama periode ini, hingga awal tahun 1964, dapat dikategorikan sebagai campuran. Di satu sisi, infiltrasi dan tekanan militer Indonesia berhasil menciptakan ketegangan politik di wilayah Malaysia Timur serta menggugah perhatian internasional. Namun di sisi lain, upaya tersebut tidak mampu menggagalkan sepenuhnya proses pembentukan negara federasi Malaysia. Meskipun Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia akan "hancur" pada 1 Januari 1964, deklarasi resmi pembentukan Malaysia tetap berhasil dilaksanakan pada 31 Agustus 1963. Keberhasilan ini sebagian besar didukung oleh solidnya aliansi pertahanan negara-negara Persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, yang secara aktif memberikan bantuan militer dan diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Hasil yang kurang maksimal dari Konfrontasi Indonesia–Malaysia juga dipengaruhi oleh konflik internal di dalam pemerintahan

Indonesia dan tubuh TNI sendiri. Jenderal Ahmad Yani bersama sejumlah petinggi militer lainnya mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap memburuknya situasi domestik, terutama krisis ekonomi dan ketegangan politik yang semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, beberapa pihak dalam militer secara diam-diam mulai menjalin komunikasi dengan pemerintah Malaysia, sembari secara internal memperlambat dan membatasi skala konfrontasi militer yang berlangsung. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kapasitas operasional TNI yang telah menurun pasca Operasi Trikora, serta untuk menghindari keterlibatan dalam konflik berkepanjangan yang dinilai tidak menguntungkan secara strategis. Selain itu, kebijakan penurunan intensitas konfrontasi ini juga merupakan bagian dari manuver politik internal militer untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, khususnya dalam menghadapi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan pendukung utama kebijakan Konfrontasi. Dengan demikian, dinamika politik dalam negeri turut menjadi faktor signifikan dalam mereduksi efektivitas konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.

Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) sebagai seruan untuk menggagalkan pembentukan Malaysia. Sebagai pelaksana, dibentuk Komando Siaga (KOGA) di bawah Marsekal Omar Dhani untuk mengoordinasikan operasi gabungan di Kalimantan dan Sumatera. Sejak Agustus 1964, cakupan konflik pun meluas. Jika sebelumnya konfrontasi terbatas pada wilayah Kalimantan, sejak Agustus 1964 Indonesia memulai kampanye infiltrasi udara dan laut ke Semenanjung Malaysia. Pasukan-pasukan Indonesia diterjunkan melalui misi lintas udara dan pendaratan laut, dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan internal di Malaysia Barat dan mendiskreditkan legitimasi pemerintah federal di mata rakyatnya maupun komunitas internasional. Ekspansi ini menandai peningkatan skala dan intensitas konfrontasi Indonesia–Malaysia secara regional. Namun, perluasan cakupan konflik ke wilayah Semenanjung Malaysia tidak memberikan hasil yang signifikan bagi Indonesia. Peran aktif TNI dalam operasi-operasi lanjutan secara bertahap diminimalkan, seiring dengan dinamika internal di tubuh militer yang sebelumnya telah disebutkan. Akibatnya, pelaksanaan konfrontasi semakin bergantung pada unsur sukarelawan sipil yang telah dilatih, yang secara kapasitas dan struktur tidak sebanding dengan kekuatan militer konvensional yang dikerahkan oleh Malaysia dan Negara-negara Persemakmuran.

Keterbatasan koordinasi, lemahnya dukungan logistik, serta berkurangnya keterlibatan langsung pasukan reguler membuat banyak upaya infiltrasi melalui jalur udara dan laut mengalami kegagalan. Sebagian besar pasukan pendarat tertangkap atau tidak berhasil mencapai sasaran strategis.

Penggunaan sistem persenjataan buatan Uni Soviet dalam Operasi Dwikora relatif minimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesiapan tempur militer Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh keengganan sejumlah unsur TNI untuk memprioritaskan konflik yang dinilai tidak strategis. Sikap tersebut juga diperkuat oleh kondisi geografis Kalimantan yang didominasi oleh hutan hujan tropis dan medan rawa, yang secara alami membatasi efektivitas operasional sistem persenjataan berat.

Meskipun dalam skala terbatas, beberapa sistem persenjataan buatan Uni Soviet tetap difungsikan dalam Operasi Dwikora. Salah satu contohnya adalah tank ringan amfibi PT-76 yang dioperasikan oleh unsur KKO AL (kini Korps Marinir TNI AL) dan ditempatkan di wilayah pesisir Kalimantan Utara, terutama di sekitar Tarakan, Nunukan, dan Pulau Sebatik. digunakan sebagai pendukung operasi mobilitas tempur dan pengamanan garis depan di kawasan perbatasan.

Selain itu, helikopter angkut buatan Soviet seperti Mil Mi-2, Mi-4, dan Mi-6 yang dioperasikan oleh TNI AD (Darat) dan TNI AU (Udara) turut digunakan dalam mendukung mobilisasi pasukan, sukarelawan, serta distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Penggunaan helikopter ini meningkatkan fleksibilitas operasi militer di tengah keterbatasan jaringan transportasi darat yang ada di Kalimantan.

Di sisi lain, pesawat angkut strategis milik TNI AU seperti Il-14 dan An-12 difungsikan dalam misi serupa, khususnya untuk mendukung operasi lintas udara ke wilayah Semenanjung Malaya. Sementara itu, pesawat jarak jauh Tu-16 kembali digunakan sebagai elemen penangkal strategis

(*deterrent*) terhadap potensi keterlibatan langsung kekuatan udara Inggris (Royal Air Force) di wilayah konfrontasi. Keberadaannya lebih berfungsi sebagai tekanan psikologis dan alat diplomasi militer daripada digunakan dalam serangan langsung.

Intensitas Operasi Dwikora mulai menurun secara signifikan setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Melemahnya posisi politik Presiden Soekarno—yang merupakan inisiator utama konfrontasi—serta naiknya Jenderal Soeharto sebagai tokoh dominan dalam pemerintahan, turut mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah Indonesia mulai mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap mediasi diplomatik, termasuk menjalin komunikasi dengan pihak Malaysia.

Upaya ini akhirnya memberikan hasil melalui penandatanganan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia pada 11 Agustus 1966, yang secara resmi mengakhiri konflik. Dalam perspektif strategis, konfrontasi ini dapat dikatakan tidak menguntungkan bagi Indonesia. Secara militer, tidak ada pencapaian teritorial atau keunggulan taktis yang signifikan; sementara secara politik, Indonesia gagal menggagalkan pembentukan Malaysia maupun menggalang dukungan internasional yang luas terhadap posisinya. Oleh karena itu, konflik ini lebih sering dipandang sebagai kegagalan dari sisi diplomasi dan operasi militer yang tidak menghasilkan keuntungan strategis yang nyata.

Secara keseluruhan, Operasi Trikora dan Dwikora mencerminkan bagaimana Indonesia memanfaatkan kekuatan militer secara maksimal dalam konteks geopolitik regional. Penggunaan sistem persenjataan modern dari Uni Soviet memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara pada masa itu. Namun keberhasilan ini juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan strategi diplomasi (Febrianto, 2014).

Masa Akhir Penggunaan Hingga Operasi Seroja (1965-1975)

Periode 1965 hingga 1975 merupakan masa transisi penting dalam sejarah pertahanan Indonesia, khususnya terkait keberadaan dan pemanfaatan sistem persenjataan. Sejak tahun 1959, Indonesia sangat bergantung pada bantuan militer, khususnya dari Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa. Pengadaan sistem persenjataan besar-besaran dilakukan melalui perjanjian kredit jangka panjang, yang salah satunya dimediasi lewat “Misi Nasution” pada tahun 1961. Dukungan ini membuat Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup unggul di kawasan Asia Tenggara pada awal 1960. Namun, ketergantungan ini menimbulkan risiko strategis, terutama ketika hubungan diplomatik memburuk. Krisis politik dalam negeri pun mempercepat berakhirnya era sistem persenjataan dari Uni Soviet (Nugroho, 2019).

Sistem persenjataan Uni Soviet tentunya memerlukan pemeliharaan khusus yang didasari oleh suku cadang dan peralatan teknis yang sesuai dan berkualitas. Namun, Indonesia sendiri tidak mendapatkan hak lisensi atas penyediaan produksi suku cadang tersebut, sehingga hampir seluruh kebutuhannya harus diimpor langsung dari Uni Soviet. Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang asimetris, di mana efektivitas operasional dari sistem senjata sangat ditentukan oleh keberlangsungan dukungan teknis dan logistik dari Moskow. Dampaknya terasa pada seluruh cabang angkatan bersenjata—TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara—yang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menerima pasokan besar-besaran peralatan militer dari Uni Soviet, sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional yang ambisius.

Pada periode 1960–1965, Indonesia menjadi salah satu negara penerima bantuan militer Soviet terbesar di Asia Tenggara. TNI Angkatan Udara, misalnya, diperkuat oleh 26 pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-16 “Badger”, 12 pengebom menengah Il-28 “Beagle”, serta sekitar 130 jet tempur dari jenis MiG-15, MiG-17, MiG-19, hingga MiG-21. Tidak hanya itu, Indonesia juga memperoleh 8 helikopter berat Mi-6 dan lebih dari 30 helikopter Mi-4, Mi-1, dan Mi-2 untuk transportasi dan dukungan udara. TNI Angkatan Laut tak kalah signifikan menerima modernisasi kekuatan laut dengan satu kapal penjelajah kelas Sverdlov (KRI Irian), delapan kapal perusak Skoryy-class, 12 kapal selam Whiskey-class, serta sejumlah kapal rudal cepat Komar-class bersenjata rudal P-15 “Styx”—rudal anti-kapal modern pada masanya. TNI AL juga diperkuat dengan

sekitar 36 pesawat torpedo Il-28T dan Il-28U. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menerima tank amfibi PT-76, panser BTR-50 dan BTR-40, serta senapan serbu AK-47, kendaraan taktis BRDM, dan berbagai sistem artileri medan serta anti-pesawat (CIA, 1970).

Namun, keadaan semakin memburuk ketika Uni Soviet mulai membatasi pengiriman suku cadang dan peralatan teknis sejak pertengahan tahun 1963. Kebijakan ini dipicu oleh semakin eratnya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terutama dalam konteks solidaritas anti-imperialisme yang secara aktif digaungkan oleh Presiden Soekarno. Ketegangan ideologis antara Moskow dan Beijing, yang dikenal sebagai *Sino-Soviet Split* (*Perpecahan Tiongkok-Soviet*) turut memengaruhi dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Uni Soviet. Bagi Moskow, kedekatan Indonesia dengan Tiongkok dipandang sebagai langkah yang merugikan secara geopolitik, terlebih karena Tiongkok saat itu tengah berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

Akibat pembatasan logistik dan teknis dari Moskow, hampir seluruh peralatan berat—terutama jet tempur MiG dan Tu-16—mengalami degradasi operasional. Sejak akhir tahun 1970, banyak dari sistem senjata tersebut dinyatakan non-aktif karena tidak lagi layak pakai akibat kekurangan suku cadang. Misalnya, jet tempur MiG-17, MiG-19, dan MiG-21 serta Tu-16 dan Il-28 seluruhnya dihentikan operasionalnya sekitar tahun 1969 dan dinonaktifkan pada tahun 1970-1971. Demikian pula kapal-kapal permukaan Soviet seperti kapal Skoryy-class dan kapal selam Whiskey-class menghadapi kendala besar dalam perawatan, yang mengakibatkan sebagian besar di antaranya ditarik dari operasional pada awal 1970. Sementara itu, tank PT-76, panser BTR-50, dan senjata ringan AK-47 yang diperuntukkan bagi pasukan darat dan marinir tetap digunakan hingga bertahun-tahun kemudian karena lebih mudah dalam perawatan dan pengoperasiannya.

Peristiwa G-30S/PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik dalam arah kebijakan militer Indonesia. Pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto membawa perubahan orientasi strategis yang signifikan, dengan penekanan pada sikap anti-komunis dan keterbukaan terhadap pengaruh Barat. Seiring dengan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dilakukannya pembersihan besar-besaran terhadap elemen-elemen kiri dalam tubuh militer dan birokrasi, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet mengalami kemunduran drastis. Akibatnya, sistem persenjataan buatan Soviet yang sebelumnya menjadi alat utama dalam kekuatan pertahanan nasional, perlahan mulai ditinggalkan karena kendala serius dalam pasokan suku cadang, pelatihan teknis, dan dukungan logistik (Bupu, 2021).

Namun demikian, transisi strategis ini tidak berlangsung secara instan. Di tengah perubahan orientasi politik dan diplomatik, TNI masih mengoperasikan sejumlah sistem persenjataan buatan Soviet, terutama pada fase awal masa Orde Baru.. Salah satu contohnya adalah keterlibatan sistem persenjataan Soviet dalam operasi-operasi militer untuk menumpas sisa-sisa kekuatan PKI pada periode 1965–1966, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Persenjataan seperti senapan serbu AK-47, panser BTR-40 dan BTR-50, serta helikopter Mil Mi-4 masih dioperasikan oleh satuan-satuan TNI AD dan Marinir untuk mendukung mobilitas, operasi pengamanan wilayah, dan pengiriman personel. Beberapa satuan juga masih mengoperasikan pesawat angkut dan pengintai buatan Soviet seperti Il-14 dan An-12 dalam rangka mendukung logistik serta patroli udara di daerah-daerah rawan.

Dalam masa transisi tersebut, Indonesia perlahan mulai mengalihkan sumber pengadaan sistem persenjataannya ke Blok Barat. Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa Barat mulai menjadi mitra utama dalam sektor pertahanan. Seiring dengan upaya stabilisasi politik yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, kepercayaan internasional terhadap Indonesia mulai meningkat. Hal ini mendorong terciptanya kerja sama militer bilateral, termasuk pelatihan dan bantuan teknis dari negara-negara Barat. Proses modernisasi dan diversifikasi sistem persenjataan pun dilakukan secara bertahap, dengan tujuan untuk menggantikan sistem lama yang tidak lagi dapat digunakan,

serta untuk membentuk postur pertahanan yang lebih profesional dan fleksibel sesuai dengan arah kebijakan baru Indonesia di tengah dinamika geopolitik pasca-Perang Dingin (Aliabbas, 2017).

Pada akhir tahun 1975, sisa-sisa sistem persenjataan buatan Uni Soviet yang masih dapat dioperasikan kembali dimanfaatkan oleh TNI dalam salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni Operasi Seroja di Timor Timur. Meskipun sebagian besar persenjataan Soviet telah dinonaktifkan atau mengalami degradasi karena keterbatasan suku cadang dan dukungan teknis, beberapa unit masih dipertahankan dalam kondisi operasional terbatas. Beberapa Kendaraan Baja seperti BTR-50 dan PT-76 masih digunakan dalam misi transportasi pasukan dan dalam tahap awal invasi.

Latar belakang dari Operasi Seroja berawal dari kekosongan kekuasaan yang terjadi di Timor Portugis, menyusul instabilitas politik di Portugal setelah Revolusi Anyelir pada April 1974. Revolusi tersebut menggulingkan pemerintahan otoriter Estado Novo dan membawa arah baru dalam kebijakan luar negeri Portugal, termasuk keinginan untuk segera mengakhiri kolonialisme di wilayah-wilayah jajahannya. Dampaknya sangat terasa di Timor Portugis, di mana berbagai kelompok lokal mulai bergerak untuk mengisi kekosongan politik dan memperjuangkan aspirasi masing-masing.

Di tengah situasi tersebut, muncul sejumlah faksi politik dengan ideologi dan kepentingan berbeda. Yang paling dominan adalah Fretilin, sebuah kelompok yang menganut paham kiri-progresif dan memiliki struktur organisasi serta kekuatan militer yang relatif lebih baik. Mereka mengusung gagasan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur dan menolak campur tangan dari kekuatan asing, termasuk integrasi ke Indonesia. Di sisi lain, kelompok seperti UDT yang sebelumnya menginginkan otonomi dalam kerangka Portugal justru kemudian berbalik mendukung gagasan integrasi dengan Indonesia, setelah terjadi konflik bersenjata antara mereka dan Fretilin. Sementara itu, Apodeti, kelompok kecil lain yang secara konsisten mendukung integrasi dengan Indonesia sejak awal, turut menyuarakan dukungan terhadap keterlibatan Jakarta. Ketegangan antar kelompok mencapai puncaknya pada pertengahan 1975, ketika perang saudara pecah dan Fretilin berhasil merebut kendali sebagian besar wilayah. Pada 28 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan di Timor Portugis, para nasionalis Indonesia dan kalangan militer garis keras, khususnya para pemimpin lembaga intelijen seperti Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) serta unit operasi khusus Opsus (Operasi Khusus), melihat kekacauan politik pasca kudeta di Portugal sebagai peluang strategis untuk mengupayakan aneksasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Mayor Jenderal Ali Murtopo, kepala Opsus sekaligus penasihat dekat Presiden Soeharto, bersama dengan Brigadir Jenderal Benny Moerdani, memimpin operasi intelijen militer yang secara aktif mendorong agenda pro-integrasi.

Namun, faktor politik domestik Indonesia pada pertengahan 1974-1975 sebenarnya belum sepenuhnya mendukung niat ekspansionis semacam itu. Skandal keuangan besar yang menimpa perusahaan minyak nasional Pertamina pada tahun 1974-75 membuat pemerintah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan donor dan kreditor internasional. Oleh karena itu, Presiden Soeharto pada awalnya menunjukkan sikap yang cukup hati-hati dan belum secara terbuka mendukung intervensi militer di Timor Timur.

Kendati demikian, pertimbangan tersebut mulai dikesampingkan oleh kekhawatiran Indonesia dan negara-negara Barat bahwa kemenangan Fretilin—kelompok yang berhaluan kiri—akan melahirkan sebuah negara komunis di perbatasan timur Indonesia. Dalam konteks Perang Dingin, hal ini dikhawatirkan dapat menjadi pangkalan potensial bagi kekuatan asing yang tidak bersahabat untuk melakukan infiltrasi ke wilayah Indonesia. Selain itu, keberadaan negara merdeka baru di dalam kepulauan Nusantara dikhawatirkan dapat memicu sentimen separatistis di provinsi-provinsi lain. Kekhawatiran ini berhasil dimanfaatkan untuk membangun konsensus dan dukungan dari negara-negara Barat yang ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, terutama Amerika

Serikat, yang pada waktu itu sedang menyelesaikan penarikan militernya dari Indochina (Vietnam). Selain alasan geopolitik dan stabilitas dalam negeri, sejarawan John Taylor mengidentifikasi tiga motif utama di balik invasi Indonesia ke Timor Timur. Pertama, untuk mencegah preseden negatif berupa wilayah yang berhasil merdeka dan dapat memicu semangat separatisme di daerah lain. Kedua, karena daya tarik terhadap potensi cadangan minyak dan gas di Laut Timor, meskipun perkiraan awalnya keliru. Ketiga, pasca jatuhnya Vietnam Selatan pada April 1975, Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai mitra utama Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam membendung pengaruh komunisme.

Awalnya, organisasi intelijen militer Indonesia mencoba menempuh strategi non-militer dengan memanfaatkan APODETI sebagai saluran legal integrasi. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru telah menyusun rencana matang untuk melakukan invasi militer ke Timor Timur. Karena tidak adanya kebebasan berekspresi dalam sistem politik Orde Baru, pemerintah Indonesia merasa tidak perlu mengonsultasikan keputusan tersebut dengan rakyat Timor Timur. Maka dimulailah tahap-tahap awal dari intervensi militer yang kemudian berpuncak pada Operasi Seroja, invasi militer terbesar dalam sejarah Republik Indonesia modern.

Operasi Seroja secara resmi diluncurkan pada 7 Desember 1975 sebagai intervensi militer besar-besaran oleh Indonesia terhadap wilayah Timor Timur, dengan persetujuan langsung dari Amerika Serikat dan juga Australia. Operasi ini melibatkan kekuatan gabungan dari tiga matra utama TNI—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tujuannya adalah untuk merebut ibu kota Dili dan menegakkan kontrol Indonesia atas wilayah yang tengah dilanda kekosongan kekuasaan pasca Revolusi Anyelir di Portugal dan menggagalkan upaya Fretilin untuk mengambil alih kekuasaan sebagai bentuk kebijakan preventif terhadap stabilitas regional dan upaya membendung komunisme.

Invasi awal dimulai dengan pengeboman laut terhadap Dili oleh kapal-kapal perang TNI AL, disusul pendaratan pasukan amfibi dan penerjunan pasukan lintas udara. Sebanyak 641 pasukan lintas udara dari berbagai kesatuan elit, termasuk Kopassandha (sekarang Kopassus) dan Kostrad, diterjunkan di sekitar kota dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit selama enam jam melawan pasukan Fretilin. Dalam kekacauan pertempuran awal, beberapa kapal perang Indonesia secara tidak sengaja menembaki posisi pasukan darat sendiri, sementara sejumlah penerjun malah mendarat di atas garis pertahanan musuh yang sedang mundur, menyebabkan jatuhnya korban di pihak Indonesia. Meskipun demikian, Dili berhasil direbut pada hari yang sama.

Operasi dilanjutkan dengan invasi tahap kedua pada 10 Desember, yang berhasil merebut kota terbesar kedua, Baucau. Pada 25 Desember, sekitar 10.000 hingga 15.000 pasukan tambahan mendarat di Liquisa dan Maubara. Hingga April 1976, kekuatan militer Indonesia di Timor Timur telah mencapai sekitar 35.000 personel, dengan tambahan 10.000 pasukan cadangan di Timor Barat. Sebagian besar dari mereka berasal dari satuan tempur elit. Pada akhir tahun, sekitar 10.000 tentara menduduki Dili, dan 20.000 lainnya tersebar di berbagai wilayah Timor Timur, menghadapi kekuatan TNI yang unggul secara jumlah dan persenjataan, pasukan Fretilin mundur ke pegunungan dan melanjutkan perlawanan melalui taktik gerilya.

Dalam pelaksanaan operasi ini, TNI memanfaatkan sejumlah sistem persenjataan peninggalan Uni Soviet yang masih operasional. Korps Marinir TNI AL mengerahkan kendaraan amfibi seperti BTR-50, K-61, dan tank ringan PT-76 untuk mendukung pendaratan amfibi di Dili dan Baucau pada 8 dan 10 Desember 1975. Kendaraan itu diangkut menggunakan beberapa kapal pendarat TNI AL, antara lain KRI Teluk Amboina (503), KRI Teluk Langsa (501), KRI Teluk Kau (504), KRI Teluk Tomini (508), dan KRI Teluk Bone (511). Keterlibatan sistem persenjataan Soviet dalam Operasi Seroja menunjukkan bahwa meskipun hubungan Indonesia dan Uni Soviet telah merenggang, sebagian dari persenjataan tersebut tetap digunakan secara aktif hingga pertengahan tahun 1975 karena belum tergantikan dalam fungsi strategis tertentu, khususnya dalam operasi pendaratan.

Meskipun militer Indonesia berhasil maju ke wilayah-wilayah utama di Timor Timur, sebagian besar penduduk lokal memilih untuk mengungsi dari kota-kota dan desa-desa pesisir yang telah diduduki, menuju wilayah pegunungan di pedalaman. Di sana, pasukan Fretilin, yang terdiri dari sekitar 2.500 prajurit reguler dimana banyak di antaranya merupakan bekas anggota militer kolonial Portugis yang dipersenjatai dengan persenjataan bekas Portugis ataupun rampasan dari pihak Indonesia—melanjutkan perlawanan bersenjata. Berbekal pelatihan dan persenjataan dari Portugal, mereka mampu memberikan perlawanan efektif yang secara signifikan membatasi kemampuan militer Indonesia untuk memperluas kendali ke seluruh wilayah Timor Timur.

Selama bulan-bulan awal invasi, kekuasaan militer Indonesia sebagian besar hanya terbatas pada kota-kota besar dan pusat administratif seperti Dili, Baucau, Aileu, dan Same. Sementara itu, wilayah pegunungan tetap menjadi basis utama perlawanan gerilya Fretilin, menciptakan konflik berkepanjangan dalam bentuk perang asimetris yang secara konsisten menantang dominasi militer konvensional Indonesia.

Meskipun secara umum Operasi Seroja dapat dikategorikan sebagai keberhasilan taktis karena Indonesia berhasil mengambil alih dan menguasai wilayah Timor Timur secara teritorial, namun dari sudut pandang strategis, operasi ini tidak sepenuhnya mencapai tujuannya. Militer Indonesia gagal menumpas perlawanan Fretilin secara menyeluruh. Sebagian besar elemen Fretilin memilih mundur ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, dan dari sana mereka melanjutkan perlawanan melalui taktik gerilya yang berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah Indonesia hanya mampu mempertahankan kontrol efektif di wilayah-wilayah pesisir dan pusat-pusat kota, sementara upaya stabilisasi dan penguasaan penuh atas pedalaman Timor Timur tidak pernah sepenuhnya tercapai. Perlawanan Fretilin terus berlanjut hingga 1999, ketika referendum yang diawasi PBB menghasilkan keputusan mayoritas rakyat Timor Timur untuk merdeka. Indonesia pun menarik kekuatan sipil dan militernya, mengakhiri hampir 24 tahun kehadirannya di wilayah tersebut.

Operasi Seroja mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur dan taktik militer Indonesia pasca-beralihnya dukungan sistem persenjataan dari Uni Soviet ke Negara-negara Barat. TNI mulai mengandalkan persenjataan, logistik, dan pelatihan dari negara-negara Barat, yang menuntut adaptasi dalam doktrin, pelatihan, dan budaya tempur. Kendati mengalami penurunan kemampuan akibat terbatasnya peralatan peninggalan Soviet, TNI tetap mampu melaksanakan Operasi Seroja secara efektif. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan adaptasi dan koordinasi militer Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks. Faktor kunci keberhasilan mencakup peran logistik, intelijen, dan operasi gabungan antarmatra. Dukungan diplomasi internasional juga membantu meredam tekanan global. Operasi ini memperkuat posisi militer dalam strategi luar negeri Orde Baru dan menjadi preseden bagi keterlibatan militer Indonesia di kawasan yang dianggap strategis. (Febrina, 2023).

Dalam konteks ini, peran Presiden Soeharto sangat dominan dalam pengambilan keputusan militer. Kebijakan Orde Baru menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai landasan pembangunan. Soeharto memanfaatkan legitimasi militer untuk memperkuat otoritas politiknya di dalam negeri. Selain itu, pendekatan realpolitik dalam kebijakan luar negeri Indonesia memungkinkan terjalinnya hubungan yang fleksibel dengan kekuatan besar dunia. Hal ini memudahkan Indonesia melakukan manuver militer tanpa intervensi besar dari kekuatan asing. Oleh karena itu, keberhasilan Operasi Seroja juga menjadi pencapaian politik Orde Baru (Nurhikmi, 2020).

Periode 1965–1975 menandai fase transisi penting dalam sejarah militer Indonesia. Dari ketergantungan pada persenjataan Uni Soviet, Indonesia beralih ke sistem pertahanan berbasis dukungan negara-negara Barat. Strategi militer pun berubah, dari defensif-revolusioner menjadi ekspansionis-pragmatis, tercermin dalam keputusan melancarkan Operasi Seroja. Fase ini sekaligus menutup era pemanfaatan persenjataan Uni Soviet dalam kekuatan militer Indonesia.

Transisi tersebut memberi pelajaran penting soal risiko ketergantungan pada satu blok politik. Pasca-1975, Indonesia mulai menerapkan pendekatan non-blok dalam pengadaan sistem

persenjataan, dengan fokus pada kerja sama multilateral, modernisasi sistem, dan peningkatan kualitas SDM militer. Pengalaman masa ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan pertahanan nasional ke depan.

-

PENUTUP

Periode 1960-1975 menandai fase penting dalam modernisasi kekuatan militer Indonesia melalui pengadaan sistem persenjataan, khususnya dari Uni Soviet. Kerjasama ini dimulai dengan kunjungan Nikita Khrushchev pada 1960 dan diperkuat melalui "Misi Nasution" yang menghasilkan kontrak pengadaan senilai 500 juta dolar AS pada 3 Januari 1961. Sistem persenjataan modern seperti pesawat tempur MiG, kapal selam Whiskey-class, dan rudal SA-2 berhasil mentransformasi TNI menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Keunggulan teknologi ini terbukti efektif dalam mendukung Operasi Trikora (1962) dan Dwikora (1963-1965), di mana Indonesia berhasil menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen diplomasi untuk merebut Irian Barat dan menghadapi pembentukan Malaysia. Skema pembayaran kredit yang fleksibel dengan bunga rendah 2,5% selama 10 tahun memungkinkan Indonesia memperoleh persenjataan canggih tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Namun, ketergantungan pada sistem persenjataan Uni Soviet menciptakan kerentanan strategis yang terbukti fatal setelah peristiwa G-30S/PKI tahun 1965. Pergeseran politik Indonesia ke arah anti-komunis di bawah Orde Baru menyebabkan putusannya hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara satelitnya, sehingga pasokan suku cadang dan dukungan teknis terhenti. Akibatnya, sebagian besar persenjataan dari Uni Soviet menjadi tidak operasional, menciptakan kekosongan kekuatan tempur yang signifikan. Meski mengalami degradasi kapasitas, TNI masih mampu melaksanakan Operasi Seroja (1975) dengan efektif, menunjukkan kemampuan adaptasi dan transformasi menuju sistem pertahanan berbasis dukungan Blok Barat. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting tentang risiko ketergantungan pada satu blok politik dan mendorong Indonesia untuk mengembangkan strategi pengadaan sistem persenjataan yang lebih diversifikasi dan multilateral di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2014). Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Yayasan Bung Karno & PT Media Pressindo.
- AGATHA, R. (2020). PERANAN AHMAD YANI DALAM OPERASI PEMBEBASAN IRIAN BARAT (1961–1963) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Aliabbas, A. (2017, August). Joint Warfighting: Lessons Learned from the Dwikora Operation Experience during the Konfrontasi, 1963–67. In *9th EUROSEAS Conference, Oxford*.
- Arif, M. (2013). Intervensi Militer Indonesia Di Timor Portugis 7 Desember 1975: Analisis Kebijakan Luar Negeri Pada Level Sistem Internasional, Politik Domestik, Dan Individu. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(2), 195-215.
- Ayuningtyas, D. R., Suharso, R., & Sodik, I. (2016). Perjuangan panglima besar jenderal soedirman pada masa revolusi fisik tahun 1945-1950. *Journal of Indonesian History*, 5(1).
- Boden, Ragna. 2008. "Cold War Economics : Soviet Aid to Indonesia". *Journal of Cold War Studies*.
- Brillianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 1-15.
- Bupu, T. N., & Sumarjana, I. K. L. (2021). Operasi Trikora Sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (Jsp)*, 11(1).
- CIA. (1961). Central Intelligence Bulletin - 1961/02/10. Directorate of Intelligence. Retrieved from <https://www.cia.gov/readingroom/document/02000192>

- CIA. (1963). *Current Intelligence Memorandum: Indonesia*. Directorate of Intelligence. Retrieved from <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp79t00429a001100010019-4>
- CIA. (1970). *Indonesia: Intelligence Memorandum Possible Resumption Of Soviet Aid To Indonesia*. Directorate of Intelligence. Retrieved from <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp85t00875r001700020044-0>
- Departemen Angkatan Laut Republik Indonesia. (1965–1966). Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut No. 5441.1/1965 s.d. 5441.5/1965 dan 5441.1/1966 s.d. 5441.16/1966 tentang Kedudukan dan Nama-nama Kapal Perang. Arsip Tekstual Departemen Angkatan Laut 1964–1967. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Derkach, N. (1965). The Soviet policy towards Indonesia in the West Irian and the Malaysian disputes. *Asian Survey*, 566-571.
- Easter, D. (2015). Active Soviet military support for Indonesia during the 1962 West New Guinea crisis. *Cold War History*, 15(2), 201-220.
- Fachruruzi, M. H. Pembelajaran Sejarah Di Smk Dalam Konteks Globalisasi. In *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia: Kajian Muatan Dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah Di Kurikulum 2013* (P. 137).
- Fahrurudji, A. (2017). Dari Druzhba ke Mirnoye Sosushyestvovaniye: Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam Era Stalin dan Krushev, 1945-1964. *Jurnal Sejarah*, 1(1).
- Febrianto, A. (2014). Alat Utama Sistem Pertahanan Dalam Upaya Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1962. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(3).
- Febrina, G. (2023). Peranan Djuwari Dalam Operasi Trikora Di Irian Barat (1961–1963). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 82–89.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Diterjemahkan oleh Notosusanto, Nugroho. (1986). Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Humaidi. 2008. "Politik Militer AURI Dalam Pemerintahan Sukarno 1962-1966." Master Thesis, Universitas Indonesia.
- Kadispenal. 2010. *Sejarah Perkembangan Alutsista TNI AL 1945-1965*. Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.
- Kadispenal. 2010. *Sejarah Perkembangan Alutsista TNI AL 1965-1985*. Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.
- Kadispenau. 2005. *Sejarah Angkatan Udara Indonesia 1950-1959 Jilid II*. Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.
- Kadispenau. 2005. *Sejarah Angkatan Udara Indonesia 1960-1969 Jilid III*. Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.
- Koessetianto, B. B., & Prasetyo, H. (2024). Comparison Of Operation Trikora And Dwikora In The Context Of The Rules Of War. *Journal Of World Science*, 3(3), 440-447.
- Mangkusubroto, M. I. (2023). Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui 'Misi Yani' pada Tahun 1959. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 776-784.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maulana, R. (2024). *Alutsista Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Periode 1959-1969* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- McVey, R. T. (2009). *The Soviet View of the Indonesian Revolution: a study in the Russian attitude towards Asian nationalism*. Equinox Publishing.
- MULYADI, S. M. (2017). *Kerjasama Ekonomi dan Militer Uni Soviet-Indonesia, 1955-1965* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nasution, Abdul Haris. 1989. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama*. Jakarta: Haji Masagung.
- Nugroho, S. (2019). Segitiga Kekuasaan Masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Sejarah*, 44, 1689-99.

- Nurhikmi, D., Thohir, A., & Samsudin, S. (2020). Peran Abdul Haris Nasution dalam Pembebasan Irian Barat (1957-1962). *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(1), 177-200.
- Oktorino, N. (2018). Nusantara Membara: Operasi Dwikora - Sebuah Perang Terlupakan Di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo (Grup Kompas Gramedia).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960, 27 Desember). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 342/1960 dan 344/1960*. Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara. (Inv. Nos. 6547 dan 6549).
- Pradicta, B. T. (2016). Peran Kapal Selam Kri Pasopati 410 Dalam Satuan Korps Hiu Kencana Pada Saat Operasi Trikora Merebut Irian Jaya 1961–1963. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1).
- Prasetyo, L. W. (2021). Politik Dan Alutsista Angkatan Udara Republik Indonesia Tahun 1945-1965.
- Purbaningsih, T. (2005). Sejarah Angkatan Udara Indonesia Jilid Iii (1960- 1969). Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Udara.
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983). Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. Sejarah TNI Jilid V (1984-2000). Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Pusat Sejarah Markas Besar TNI. 2005. Operasi Dwikora 1962-1966. Jakarta: Pusat Sejarah Markas Besar TNI.
- Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008 . Jakarta : Serambi
- Riyadi, B. S. (2007). Perkembangan Kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia (Auri) 1959-1965. Skripsi. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Singh, Bilveer. 1986. "Soviet-Indonesian Relation 1945-1968". Tesis. Australian National University
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Pratama, F. S. G. (2023). Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan Dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue. *Journal Of Political Issues*, 4(2), 120-136.
- Taylor, J. G. (1990). *The Indonesian occupation of East Timor 1974-1989: a chronology*. Catholic Institute for International Relations.
- Tim Buku Tempo. 2010. Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tim Penyusun Angkasa. 2011. Operasi Udara Trikora. Jakarta: PT Mediarona Dirgantara.
- Van der Kroef, J. M. (1960). Indonesia in the Cold War. *Current History*, 38(222), 88-94.
- Yazid, M. N. M. (2016). Indonesian relations with the Eastern Europe, Soviet Union and China before 1965: Systemic and domestic factors. *Rev. Eur. Stud.*, 8, 253.